

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 6 (2). 2021. hlm. 482-496.
- Agus Salim, Ria Anggraeni Utami, Zico Junius Fernando. "Green Victimology : Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol 7 (1). 2017. hlm. 60-79.
- Akhmad Khalimy. "Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)", *Jurnal Hukum Progresif*. Vol 8 (2), 2020. hlm. 121- 135.
- Andri G. Wibisana. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi : Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan". *Mimbar Hukum*. Vol 29 (2). 2017. hlm. 293-307.
- Andri Gunawan. "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun : Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia". *ICEL*. Vol 6 (1). 2019. hlm. 41-71.
- Anita. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Dharmasisya*. Vol 2 (1). 2022. hlm. 321-334.
- Ali Achmad. 2017., *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Alwiyah Sakti Ramdhon, dkk. "Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *AMSIR Law Journal*. Vol 3 (1). 2021. hlm 30-38.
- Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia*, Vol 3 (2). 2014. hlm. 118-130.
- Cahyono. "Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Menanggulangi Kasus Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH". Artikel Pengadilan Negeri Sleman. 2024. hlm 20.
- Chazawi adami, 2008., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Clearestha Nakita, Fatma Ulfatun Najicha. "Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia", *Ius Civile*, Vol 6 (1). 2022. hlm. 93-103.
- Dwi Sulistiani. "Kompensasi Sebagai Alat Peningkatan Kinerja Dalam Bingkai Agency Theory". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol 1 (1). 2016. hlm. 89-102.
- Elly Kristiani Purwendah. "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 1. 2009. hlm. 139-151.
2009. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*. Bandung : Refika Aditama.
- mitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak encucian Uang di Indonesia". *ICEL : Jurnal Hukum Lingkungan* 9 (2). 2023. hlm. 239-278.



- Fransiska Novita Eleanora. "Argumentasi Hukum (*legal reasoning*) dan Kaidah-kaidah hukum Masyarakat". *Jurnal hukum islam*. hlm. 73-81.
- Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, khaidar Rohman. "Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol 16 (1). 2023. hlm. 1-9.
- Fristian. P Mondoringin. "Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008". *Lex Privatum*. Vol 4 (3). 2016. hlm. 131-138.
- Ghufran syahputera, hendrik salmon & julista mustamu. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2021. Vol 1 (9). hlm. 961-970.
- Grahat Nagara. "Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam". *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol 3 (2). 2017. hlm. 20-40.
- Grita Anindarini W. "Setelah UU Cipta Kerja : Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup". *ICEL*. 2020. hlm. 1-23.
- Gusti Fadhil Fithrian Luthfan. "Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights". *Lex Renaissance*. Vol 4 (1). 2019. hlm. 81-103.
- Hadjon M, Philipus. dkk., 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Hariodanang Pambudhi dan Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 7 (2). 2021. hlm. 297-322.
- Hariyanto. "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional". *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 13 (2). 2022. hlm. 297-312.
- Herpita Wahyuni & Suranto. "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia". *JlIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol 6 (1). 2021. hlm. 148-162.
- HR Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Ida Nurlida. 2016. "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia". *Bina Hukum Lingkungan*. Vol 1 (1). hlm. 2-9.
- Inge Dwisvimiar. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 (3). 2011. hlm. 523-531.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Litra Buana Media.
- Idara. 2019. *Asas Pidana*. Depok : Rajawali Pers.
- Idara & Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup". *Pagaruyuang Law Journal*. Vol 1 (1). 2021. hlm. 47-56.
- Idara. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Administrasi". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol 7 (2). 2014. hlm 117-138.



- Josina E. Londa, Suriyono Soewikromo. "Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan dan Pencemaran". *Lex Privatum*. Vol 9 (11). hlm 56-66.
- Latif Abdul, hasbi ali. 2014. *Politik Hukum*. Bandung : Sinar Grafika.
- Lisa Ikhsana, Nabila Alya. "Civil Lawsuit Cases of Forest and Land Fires PT Kalista Alam (Study of Meulaboh District Court Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO). *Jurnal Scientia Indonesia*. Vol 7 (2). 2021. hlm 192.
- Mario Agritama, dkk. "Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional". *Lex Renaissance*, Vol 8 (2). 2023. hlm. 189-213.
- Maskun, dkk. "Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis : Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan", *Media Iuris*, Vol 5 (2). 2022. hlm. 331-350.
- Maskun, dkk. "Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser". *Jurist-Diction*. Vol 5 (3). 2022. hlm. 931-333.
- MD Mahfud. 2010. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Mispansyah., Nurunnisa. "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 6 (2). 2021. hlm. 349-366.
- M Rizqy Darulzain, HM Kabul Supriyadhie dan Rahayu. "Penerapan Foundational Principles of The State Duty to Protect Human Rights dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs): Studi terhadap Perlindungan HAM Pekerja di Sektor Perikanan Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Vol 6 (2). 2016. hlm.1-12.
- Muhammad Hasan Muazis. Sengkarut dan Ketumpulan Regulasi Penyelesaian Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan. *Indonesian State Law Review*. Vol 3 (1). 2020. hlm. 23-38.
- Muhammad Agil Aufa Afinnas. "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan". *Prosiding Seminar Hukum Aktua UIII*, hlm. 47-61.
- Nabila Aulia Rahma. "Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 3 (11). 2022. hlm. 892-911.
- Nurhaini Elisabeth Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Ode La Angga, dkk., 2021. *Hukum lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Olivia Anggie Johar, M.Yusuf Daeng, Tri Novitasari Manihuruk. "Pertanggungjawaban naran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Provinsi Riau". *Jurnal Hukum Respublica*. 2022. hlm. 131-154.
2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo
- h, Tri Salwa Nur Eida. "Analisis Yuridis Terhadap Penyerobotan yang Digunakan Sebagai Kebun Sawit oleh Pihak Swasta di Riau". *Jurnal*. Volume 4 (1). 2024. hlm. 274-288.



- Ridho Mubarak, Alvi Syahrin. "Efektivitas Hukum Terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan". *Jurnal Mecatoria*. Vol 15 (2). 2022. hlm. 128-138.
- Risno Tampilang. "Dualisme Ekosentrisme dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 dan Respon terhadap Gerakan Ekofeminis dalam Melihat Tindakan Eksploitasi Lingkungan". *Jurnal Mello*. Vol 4 (2). hlm. 25.
- Rizki Zakariya. "Menyoal Aspek Pemidanaan pada Kluster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan". *Litra : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*. Vol 1 (2). 2022. hlm. 154-170.
- Ruben Achmad. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana". *Fiat Justicia*. Vol 2 (1). 2016. hlm 11-20.
- Rudri Musdianto Saputro. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol 7 (1). 2023. hlm. 25-32.
- Ronny A. Maramis. "Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)". *Lex Administratum*. Vol 8 (2). 2020. hlm. 85-97.
- Sahar Maruli. "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan". *Res nullius Law Journal*. Vol 1 (2). 2019. hlm. 139-148.
- Sani Nur Asih, Ricco Andreas, dkk. "Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Indonesia dan Potensi Konflik Hukum Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja". *Istinbath*. Vol 20 (1). hlm. 54-70.
- Santi Pratama Anggraini dkk. "Menganalisis Kasus Korupsi : Surya Darmadi Diduga Terjerat Kasus Korupsi Penguasaan Lahan Sawit Terbesar". *Causa Journal*. Vol 1 (1). 2023. hlm. 1-19.
- Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa., 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: USAID.
- Siti sarah, Radea Yuli A. Hambali. "Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology". *Gunung Djati Conference Series*. Vol 19. 2023. hlm. 754 -761.
- Sodikin. "Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya", *Supremasi : Jurnal Hukum*, Vol 3 (2). 2021. hlm. 106-125.
- Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2 (1). 2019. hlm 126-142.
- Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan dan Penagakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol 48 (2). 2019. hlm. 147-163.
- Syaiful Hidayat, dkk. "Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (compliance Approach) in Penjeraan dalam Penegakan Hukum Lingkungan". *Tanjungpura*. Vol 6 (1). 2022. hlm. 1-13.
- Syaiful Hidayat, Otong Rosadi. "Implementasi Prinsip Ultimum Remedium kan Hukum Pada Kawasan Keterlanjuran". *Unes Law Review*. Vol 1. 2022. hlm. 1667-1675.



- Syarif Saddam Rivanie, dkk. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Review*. Vol 6 (2). 2022. hlm 176-188.
- Ucik Fatimatuazzahro, Yana Indawati. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur)". *Jurnal Politik Hukum*. Vol 1 (1). 2023. hlm. 26-38.
- Yodi Achmad Kurniawan & Mukhlis. "Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 6 (2). 2022. hlm. 4739 - 4752.
- Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerimaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang kehutanan.
 Permen LHK No 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT. Kaswari Unggul vs. Menteri KLHK, PTUN Jakarta Nomor 104/G/LH/2017/PTUN-JKT (PTUN Jakarta, 2017).
 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rh.

Artikel lainnya

Sadino. 2010. "Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia". Disertasi. Bandung. Universitas Katolik Parahyangan.

Kompas. "[Masih Ada Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin di Kalimantan Tengah dan Riau](#)",[Masih Ada Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin di Kalimantan Tengah dan Riau - Kompas.id](#)



Optimized using
 trial version
www.balesio.com

Asasi Manusia, Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan
 ndemi Covid-19 (Komnas HAM 2021). hlm. 10.

[es Hukum Surya Darmadi, Jalan Jerat Kasus Kebun Sawit Serupa
 Mongabay.co.id](#)", [Mangabay](#), diakses pukul 19.33.

1 3,3 juta hektar sawit dalam hutan".
[ji.or.id/pengampunan-3-3-juta-hektar-sawit-dalam-hutan-
 erintah-terhadap-korporasi](#).

Warta Pemeriksa BPK. “Pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin”, [Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan WARTA DIGITAL](#)



Optimized using
trial version
www.balesio.com